

ABSTRAK

Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Petani berperan penting dalam upaya membangun pertanian ke arah yang lebih maju untuk mempertahankan ketahanan pangan serta kedaulatan pangan. Skripsi ini ditujukan untuk mengkaji mengenai aspek pidana dan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Membudidayakan tanaman merupakan sebuah sarana pertanian atau hak bagi petani dalam meningkatkan kedaulatan pangan di sector pertanian. Namun dalam UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan masih belum nampak secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi hak petani dimana ada petani yang dijatuhi pidana akibat tidak mempunyai izin untuk menjadi pembudidaya benih tanaman pangan. Skripsi ini juga akan mengkaji secara khusus mengenai aspek pidana dan perlindungan hukum bagi hak petani yang melakukan pembudidaya benih tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhannya dan upaya untuk meningkatkan kedaulatan pangan di sektor pertanian

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliitian ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa regulasi mengenai sistem budidaya belum cukup untuk mencapai kedaulatan pangan dan belum nampak bentuk perlindungan hukum terhadap hak petani dalam mencapai kesejahteraan petani untuk melaksanakan pembudidayaan benih pangan. Regulasi mengenai sistem budidaya harus seimbang dalam pelaksanaan bersama penegak hukum dalam memenuhi hak para petani untuk mencapai sebuah kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.

Kata Kunci: perlindungan – pertanian– pidana

ABSTRACT

Sustainable Agricultural Cultivation System is the management of biological resources in producing agricultural commodities to meet human needs in a better and sustainable manner by preserving the environment. The Government and Local Governments as well as Farmers play an important role in efforts to develop agriculture in a more advanced direction to maintain food security and food sovereignty. This thesis is intended to examine the criminal aspects and legal protection of farmers' rights in Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems. Cultivating crops is a means of agriculture or a right for farmers in increasing food sovereignty in the agricultural sector. However, in the Sustainable Agricultural Cultivation System Law, there is still no clear legal protection for farmers' rights where there are farmers who are sentenced to punishment for not having a license to become a food crop seed cultivator. This thesis will also examine specifically the criminal aspects and legal protection for the rights of farmers who cultivate food crop seeds to meet their needs and efforts to improve food sovereignty in the agricultural sector.

The research method used in this research is normative research using a statutory approach, concept approach and case approach.

The results of this study show that regulations regarding the cultivation system are not sufficient to achieve food sovereignty and there is no visible form of legal protection of farmers' rights in achieving the welfare of farmers to carry out food seed cultivation. Regulations regarding the cultivation system must be balanced in implementation with law enforcement in fulfilling the rights of farmers to achieve a welfare of farmers and food sovereignty.

Keywords: protection - agriculture - criminal